

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

TIFANI RAMADHANI

2021/21133089

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

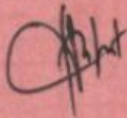
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nama : Tifani Ramadhani
NIM : 21133089
Program Studi : Akuntansi (D3)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Akuntansi

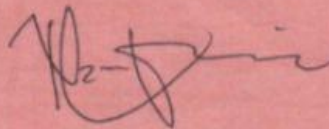


Mayar Afriventi, SE, M.Sc.
NIP. 19840113 200912 2 005

Padang, Agustus 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Halkadri Fitra, SE, M.M.Ak
NIP. 198008092010121003

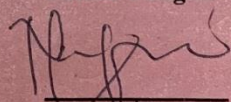
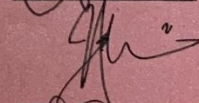
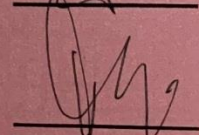
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Tifani Ramadhani
NIM/ TM : 21133089 / 2021
ProgramStudi : Diploma Tiga (D3) Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Negeri Padang*

Padang, Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Halkadri Fitra, S.E.,M.M, Ak.	(Ketua)	
Herlina Helmy, SE, M.S, Ak.	(Anggota)	
Jefriyanto,S.E, M.Ak.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tifani Ramadhani
NIM/TM : 21133089/2021
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 13 November 2002
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Komplek Villa Anggrek 3 Balai Gadang Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2024

Yar

Tu

Tifan

NIM. 21133089



ABSTRAK

Tifani Ramadhani : Analisis Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Pembimbing : Halkadri Fitra, S.E.,M.M,AK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Rasio Likuiditas, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023 yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 Kota Padang, Sumatera Barat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilihat dari (1) Rasio Likuiditas dengan indikator yaitu Rasio Lancar, Rasio Lancar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018-2023 tahun yang terbaik adalah tahun 2021 yaitu sebesar 14,90 dikategorikan lancar. (2) Rasio Efektivitas PAD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 sebesar 92,02% dengan kategori Efektif. (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 sebesar 161,29% dengan kategori Tidak Efisien.

Kata Kunci : *Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Likuiditas, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang melimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”** dengan baik serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh penjurur dunia. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi penulis namun pada akhirnya dapat berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan berbagai kemudahan dan pelayanan yang optimal selama perkuliahan.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc Ketua Jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan berbagai kemudahan dan pelayanan yang optimal sehingga peneliti dapat mengikuti perkuliahan dengan baik sampai akhirnya menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Halkadri Fitra, S.E.,M.M.,AK selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan Tugas Akhir.

4. Kedua Orang Tua Ayah Asmon dan Ibu Sussanti yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.
5. Kepada Mamak atas nama Doni Wahyudi yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.
6. Kepada saudara kandung atas nama Silvia Angraini, S.Kep yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh staf pengajar jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pihak yang telah membantu memberikan dukungan.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas laporan ini.

Akhir kalimat dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kita bersama.

Padang, 15 Agustus 2024

Tifani Ramadhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kinerja Keuangan	10
1. Pengertian Kinerja Keuangan	10
2. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan.....	11
3. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan.....	12
4. Tahap-tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan	12
5. Pengukuran Kinerja Keuangan	13
B. Laporan Keuangan	15
1. Pengertian Laporan Keuangan.....	15
2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	15
3. Komponen Laporan Keuangan	16
C. Analisis Laporan Keuangan.....	21
1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan.....	21

2. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan.....	22
D. Analisis Rasio Keuangan.....	22
1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan.....	22
2. Manfaat Analisis Rasio Keuangan	23
3. Jenis-jenis Rasio Keuangan	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
D. Rancangan Penelitian	29
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum.....	34
1. Sejarah Singkat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	34
2. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	38
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	39
4. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	44
B. Hasil Penelitian	46
1. Rasio Likuiditas	46
2. Rasio Efektivitas PAD SKPD	46
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah SKPD	53
C. Pembahasan	57
1. Rasio Likuiditas	54
2. Rasio Efektivitas PAD SKPD	59
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah SKPD	63

BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	5
Tabel 2.1 Kriteria Rasio Lancar.....	24
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas PAD SKPD	26
Tabel 2.3 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah SKPD.....	27
Tabel 4.1 Hasil dari perhitungan Rasio Lancar tahun 2018-2023	47
Tabel 4.2 Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD SKPD tahun 2018-2023	50
Tabel 4.3 Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah SKPD pada tahun 2018-2023.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

Lampiran 7 Neraca Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018

Lampiran 8 Neraca Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019

Lampiran 9 Neraca Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

Lampiran 10 Neraca Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Lampiran 11 Neraca Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

Lampiran 12 Neraca Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah yang dimilikinya, daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola daerahnya. Daerah harus menjadi lebih mandiri sehingga mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah mengelola keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik maka dilakukan dengan cara menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberi perspektif tambahan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah (Maulina dkk., 2021).

Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Kinerja pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana dalam

melakukan pembangunan daerah bersangkutan. Oleh karena itu kinerja pemerintah perlu untuk dilakukan pengukuran agar dapat diberikan suatu pernyataan keberhasilan pemerintah daerah dan dapat diidentifikasi perbaikan jika memang diperlukan (Mardiasmo, 2016).

Kinerja keuangan adalah suatu cara pengukuran pengelolaan keuangan organisasi atau perusahaan dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Kamus Akuntansi Manajemen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas atau suatu unit organisasi. Untuk mengetahui kinerja pemerintah maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap laporan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kinerja keuangan pemerintah menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya.

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2019). Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan dengan cara menghitung analisis kinerja keuangan daerah.

Kinerja Keuangan daerah dapat diukur dengan Rasio Likuiditas, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Menurut Kasmir (2016) rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya jika perusahaan ditagih, perusahaan mampu untuk membayar hutang tersebut terutama hutang yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas juga berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan.

Menurut Halim (2019) rasio efektivitas PAD merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam suatu daerah untuk mewujudkan realisasi pada pendapatan daerah sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah. Pendapatan asli pada suatu daerah dapat dikatakan dengan kategori efektif jika hasil atau nilai yang dicapai 100 atau lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai suatu rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintahan.

Menurut Halim (2019) rasio efisiensi keuangan daerah merupakan rasio yang menggambarkan pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah. (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil disbanding total penerimaan daerah.

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintah daerah kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah salah satunya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kehutanan Sumatera Barat merupakan lembaga teknis daerah dibidang pengelolaan kawasan kehutanan serta hasil produksi kehutanan di Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kehutanan. Semakin lama pemerintah maka semakin pesat perkembangannya, baik dalam tingkat pusat maupun daerah. Namun hal tersebut menyebabkan timbulnya kenyataan semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi (Afni, 2024). tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi dimaksud adalah akuntabilitas publik seperti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan sumber daya kepada publik dan pemangku kepentingan. Dan transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi terkait dengan keuangan, termasuk anggaran, pengeluaran, dan hasil kegiatan. Informasi ini harus tersedia untuk publik sehingga mereka dapat mengevaluasi kinerja keuangan lembaga secara independen.

Berikut ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
2018	40.261.000	42.066.780	104,49	103.168.994.701	92.870.576.872	90,02
2019	41.273.790	42.209.958	102,27	99.530.301.397	86.209.305.057	86,62
2020	42.066.780	42.788.178	101,71	57.164.559.128	56.209.230.503	98,33
2021	42.066.780	40.019.872	95,13	78.657.557.809	73.939.991.292	94,00
2022	100.000.000	56.164.364	56,16	82.451.095.660	80.415.328.501	91,95
2023	100.000.000	92.401.497	92,40	82.173.410.624	77.133.815.531	93,87

*(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018-2023)*

Pada tabel diatas menunjukkan target dan realisasi yang mengalami naik turun setiap tahunnya dan belum dapat terealisasi secara optimal, terbukti pada tabel 1.1. Pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Daerah melebihi target dengan presentase 104,49%, kemudian pada tahun 2019 target dan realisasi mengalami penurunan tetapi Realisasi Pendapatan Daerah melebihi target dengan presentase 102,27%. Pada tahun 2020 target dan realisasi mengalami penurunan dan juga Realisasi Pendapatan Daerah melebihi target dengan presentase 101,71% kemudian pada tahun 2021 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan tetapi Realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target dengan presentase 95,13%. Pada tahun 2022 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan tetapi Realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target dari Pendapatan Daerah dengan presentase 56,16%. Pada tahun 2023 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan tetapi

Realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target dengan presentase 92,40%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada Realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Target dan hanya berkembang secara *fluktuatif*. Sedangkan Target dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2018 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2018, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2019, pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2020, pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2021 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa adanya perubahan naik dan turunnya realisasi pendapatan dan belanja daerah, peneliti menyatakan bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan menentukan naik atau turunnya kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif disebabkan karena banyaknya kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, adanya gangguan seperti pandemi Covid'19 yang dapat mengakibatkan bertambahnya belanja daerah yang tak terduga, dan pembelanjaan peralatan kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan menganalisis sejauh mana pengaruh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kinerja keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selama enam tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2023, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, jujur, efektif, dan efisien. Apakah kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selama ini sudah mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan

mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau sebaliknya. Penelitian berusaha untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun 2018-2023 menggunakan analisis rasio keuangan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Analisis Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan Rasio Likuiditas?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan Rasio Likuiditas.
2. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah SKPD
3. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah SKPD

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan serta memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis terhadap kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

2. Bagi Universitas Negeri Padang

Diharapkan dapat memberikan informasi dan salah satu sumber referensi tentang kajian teori bagi peneliti selanjutnya yang menyukai pada bidang dan topik yang sama.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang bermanfaat dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut dan sebagai bahan rujukan dalam kondisi pemerintah daerah secara benar dan objektif.

4. Bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan mengenai perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terutama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan ke depan.

BAB V

PENUTUP

Bab V ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang di dalamnya peneliti akan menyampaikan kesimpulan singkat dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis data yang diperoleh setelah proses pengambilan data. Selanjutnya, diberikan juga saran sebagai masukan untuk penelitian lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti menggunakan rasio keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat jika dinilai berdasarkan rasio likuiditas pada rasio lancar dari tahun 2018 sampai tahun 2023, tahun yang lebih baik adalah tahun 2021 sebesar yaitu 1490% artinya setiap Rp 1 Kewajiban Jangka Pendek dijamin oleh Rp 14,90 aset lancar sehingga dikategorikan lancar karena nilai aset lancar diatas 1.
2. Kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat jika dinilai berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2023, rata-ratanya adalah 92,02% dikategorikan dengan kemampuan keuangan yang efektif karena persentase berada antara 90% sampai 100% dan hasil dari 6 tahun yang telah diteliti dari tahun 2018 sampai 2023 maka tahun yang terbaik adalah tahun 2018 sebesar 104,49% dikategorikan dengan kemampuan keuangan yang sangat efektif karena persentase diatas 100%.

3. Kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat jika dinilai berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2023, rata-ratanya adalah 161,29% dikategorikan dengan Tidak efisien karena persentase berada diatas 100%. Dinas Kehutanan masih terjadi pemborosan dalam belanja seperti melakukan pengadaan peralatan kantor, seperti pengadaan komputer, printer dan AC. Sehingga Dinas Kehutanan mengalami pemborosan dan belum menerapkan penghematan anggaran secara efisien dan hasil dari 6 tahun yang telah diteliti dari tahun 2018 sampai tahun 2023 maka tahun yang terbaik adalah tahun 2023 sebesar 83,47% dikategorikan dengan cukup efisien karena persentase berada antara 80% sampai 90%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini akan diberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola keuangan dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD-nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil analisis rasio yang telah penulis paparkan maka diharapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mampu meningkatkan tingkat pendapatan asli daerah serta mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus selalu berusaha menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya bagi

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan membuat peraturan daerah bagi beberapa sektor pajak yang dianggap potensial.

4. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus dapat memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus lebih transparansi dalam menyusun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Widyastuti. (2021). Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas dan Efisiensi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Vol. 8 No.1 Juli 2021.
- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Arumdi, Rindang. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2013-2017. *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang*. Palembang. Akuntansi.
- Budiman, R. (2020). *Rahasia Analisis Fundamental Saham Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Deliana Br.P. (2021). Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Mutiara Manajemen*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2021. 37-45.
- Dara Nadeya. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3 No.4 Oktober 2023. 173-183.
- Fitra, Halkadri. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Modul. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Fahmi. (2017). *Analisis Kinerja Manajemen*. Edisi Ke-1. Bandung. Alfabeta
- Fauziyah Fanalisa. (2022). Analisis Rasio Likuiditas, Aktivitas, Solvabilitas, Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Management Risiko Dan Keuangan*. Vol. 1 No. 4 Tahun 2022.

- Handayani, Anis Karlina dan Nur. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol. 6 No. 3, 3 Maret 2017.
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irnawati. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*. Vol. 4 No. 3, 3 Juni 2023. 403 – 416
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad Saifrizal. (2022). Analisis Rasio Keuangan dalam menilai kinerja keuangan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Bireuen: UISKI.
- Mardiasmo. (2016). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muhammad Yafiz. (2023). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Menggunakan Value for Money pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntan Publik*, Vol. 1 No. 4, 4 Desember 2023. 40-56.
- Novereis, (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tana Toraja. Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Vol.2, No.1 Juni 2023 e-ISSN: 2964-2027; p-ISSN: 2964-5700, 102-115 DOI: <https://doi.org/10.59024/semnas.v2i1.150>
- Nurliah. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum. *Jurnal Tata Kelola*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2023.

Puspita. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Barru. *Jurnal of Management*, Vol 6. No. 2, Tahun 2023. 487-495.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Priyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Zifatama Publishing

Putri Ramadana (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk mengukur kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 2 No.2, 2 Maret 2024. 80-88

Sugiyono. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Vol. 7 No. 1, 1 Maret 2019. 81-92.

Trianto, A. (2018). Analisis laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. Vol. 8 No. 3, 3 Desember 2017. 1-10